

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2017 disusun berdasarkan arah pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2014-2015 dengan tetap memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Kebijakan pembangunan nasional tahun 2017 diarahkan untuk mendukung tercapainya Nawa Cita, sebagai berikut:

1. Melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan, serta jaminan sosial untuk rakyat;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional;
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.

Untuk mendukung tercapainya prioritas pembangunan tersebut, maka tema pembangunan yang ditetapkan di dalam Rencana Kerja

Pembangunan (RKP) tahun 2017 adalah “**Memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah**”, dengan penekanan :

1. Dimensi pembangunan manusia
 - a. Pengarusutamaan Revolusi Mental dalam setiap prioritas dan kegiatan pembangunan;
 - b. Mempertahankan anggaran pendidikan dan kesehatan masing-masing 20% APBN dan 5% APBN (kebijakan pokok antara lain distribusi guru yang merata yang sekaligus akan mengendalikan biaya gaji dan tunjangan guru yang saat ini sudah sekitar separuh anggaran pendidikan);
 - c. Melanjutkan pembangunan perumahan yang sudah dimulai di APBNP 2015 dengan program sejuta rumah.
2. Dimensi pembangunan sektor unggulan meliputi :
 - a. Kedaulatan Pangan;
 - b. Kedaulatan Energi;
 - c. Kemaritiman dan Kelautan;
 - d. Pengembangan kawasan ekonomi khusus, kawasan industri dan pariwisata.
3. Dimensi pemerataan antar pendapatan dan wilayah :
 - a. Menjamin peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin dalam kondisi perekonomian yang masih tumbuh antara 5-6% melalui peningkatan penerima Bantuan Tunai Bersyarat dan mempertahankan dukungan untuk mengurangi beban penduduk miskin dan rentan;
 - b. Reforma agraria ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian hak milik atas tanah yang meliputi redistribusi tanah dan legalisasi aset redistribusi tanah seiring dengan meningkatnya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah;
 - c. Pembangunan kawasan perbatasan difokuskan pada 2 (dua) sasaran pembangunan yaitu meningkatkan pertahanan dan keamanan serta pengembangan pusat ekonomi perbatasan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- d. Pengurangan kesenjangan dengan membangun dari pinggiran, memperkuat daerah dan desa serta pengentasan daerah tertinggal. Pembangunan Indonesia (Indonesia sentris) lebih diutamakan dibandingkan pembangunan di Jawa (Jawa Sentris), walaupun RoI lebih tinggi di Jawa. Pendulum pembangunan harus banyak bergerak ke luar Jawa;
 - e. Menekankan konektivitas antar wilayah dalam RKP 2017 pada penyelesaian proyek-proyek yang akan menurunkan biaya logistik dan mendukung pembangunan kawasan;
 - f. Infrastruktur menjadi motor penggerak pembangunan untuk mendorong masuknya investor dengan penguatan sektor riil sehingga akan mempermudah pencapaian cita-cita dalam membangun tol laut, karena arus barang dan jasa dari jalur tol laut akan terisi penuh (orang dan) barang-barang produksi lokal.
4. Penekanan kondisi perlu (Polhukhankam), dengan penekanan :
- a. Memenuhi secara bertahap *Minimum Essential Forces* dengan peran industri pertahanan dalam negeri yang makin meningkat;
 - b. Memantapkan penegakan hukum;
 - c. Memantapkan reformasi birokrasi;
 - d. Memantapkan konsolidasi demokrasi melalui penguatan aspek-aspek demokrasi termasuk komunikasi dan informasi publik serta menguatkan efektivitas diplomasi dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan, perlindungan WNI/BHI, pelaksanaan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan, termasuk Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular.

Sementara itu, untuk mendukung prioritas pembangunan nasional tahun 2017, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan tema RKPD Tahun 2017 yaitu “**Pembangunan yang Berkeadilan, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia dengan Memperluas dan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur serta Peningkatan Pelayanan Publik**”, dengan prioritas pembangunan :

1. Peningkatan Mutu Pelayanan Dasar (Pendidikan dan Kesehatan);
2. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran;

4. Pengembangan Industri dan Perdagangan;
5. Pengembangan Koperasi dan UMKM;
6. Peningkatan Kedaulatan Pangan;
7. Peningkatan Infrastruktur;
8. Kemaritiman dan Kelautan;
9. Harmonisasi Sosial.

Mempertimbangkan proyeksi ekonomi makro daerah, hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Lalu, isu strategis yang dihadapi, serta kondisi perekonomian dan prioritas pembangunan nasional maupun Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Kediri menetapkan tema RKPD Tahun 2017, yaitu “***Meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat melalui fasilitasi pemberdayaan masyarakat, percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas pelayanan publik***”.

Selaras dengan prioritas pembangunan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Kediri menetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2017 sebagai penjabaran prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Kediri tahun 2014-2019, yaitu :

1. Penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan bersih, serta reformasi birokrasi dan profesionalisme pelayanan publik

Sasaran utama dari prioritas ini adalah meningkatnya efektifitas dan kapabilitas kelembagaan pemerintah daerah untuk pelayanan publik yang berkualitas, terwujudnya manajemen aparatur sipil negara yang mengarah pada kebutuhan pelayanan prima di seluruh satuan kerja perangkat daerah Kota Kediri serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut akan mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Kota Kediri dipantau secara terus menerus melalui survey indeks kepuasan masyarakat dan program SURGA (SUara waRGa) yang berfungsi untuk menampung aspirasi masyarakat secara langsung melalui media internet maupun telepon seluler.

Hasil pengukuran tingkat kepuasan masyarakat akan memberikan umpan balik bagi peningkatan layanan publik. Program yang dilaksanakan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih, serta reformasi birokrasi dan profesionalisme pelayanan publik, antara lain: peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, penataan dan penyempurnaan kebijakan sisdur pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan pelayanan prima serta penataan administrasi kependudukan.

2. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar masyarakat

Infrastruktur yang memadai secara kuantitas dan kualitas merupakan penopang bagi perekonomian masyarakat. Selain itu, upaya menciptakan kenyamanan dalam masyarakat dapat diwujudkan salah satunya melalui penyediaan infrastruktur. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait infrastruktur, diantaranya: genangan air yang masih muncul di beberapa titik ketika hujan deras, lampu penerangan jalan belum menjangkau semua lokasi, sarana-prasarana persampahan yang belum optimal, ruang terbuka hijau yang masih minim, masalah sarana prasarana transportasi yang masih perlu ditingkatkan.

Permasalahan tersebut menjadi salah satu prioritas yang akan diselesaikan melalui program/kegiatan SKPD terkait. Upaya yang dilakukan mengatasi berbagai masalah tersebut adalah melalui penyediaan infrastruktur dasar masyarakat meliputi jalan dan jembatan, sarana-prasarana gedung kantor, drainase untuk pengendalian banjir, pengelolaan jaringan irigasi, sarana-prasarana persampahan, penyediaan ruang terbuka hijau, sarana dan prasarana pelayanan angkutan darat, sarana dan prasarana lalu lintas, penyelenggaraan jasa layanan komunikasi dan informasi, serta infrastruktur pendukung lainnya.

3. Penataan Kota yang Ramah Lingkungan dan berbasis Ekologi

Masalah lingkungan merupakan isu global yang perlu diselesaikan oleh seluruh *stakeholders*, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta. Pembangunan yang dilakukan pemerintah, masyarakat maupun swasta harus tetap menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah Kota Kediri memberikan perhatian terhadap masalah lingkungan dengan menjadikannya sebagai salah satu prioritas pembangunan Kota Kediri.

Sasaran yang ingin dicapai pada prioritas ini adalah sebagai berikut: meningkatnya kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan pelaksanaan AMDAL, meningkatnya pengendalian dan pemantauan mutu sumber daya air, meningkatnya ketaatan penegakan hukum lingkungan, meningkatkan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

4. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan prasyarat keberhasilan pembangunan. Sampai saat ini, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Kediri relatif baik dan terjaga, hal ini tercermin dari tidak terjadinya konflik-konflik yang bermotif Suku Ras dan Agama (SARA).

Dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, Pemerintah Kota Kediri berupaya secara terus menerus menjalin komunikasi dan mempererat hubungan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) serta seluruh elemen masyarakat. Hal ini merupakan salah satu upaya menciptakan kerukunan antar semua elemen masyarakat serta untuk deteksi dini terhadap permasalahan yang timbul di masyarakat agar segera dapat diselesaikan.

Selain itu, untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, Pemerintah Kota Kediri memberikan perhatian kepada organisasi keagamaan dan meningkatkan sarana-prasarana ibadah. Hal ini diwujudkan melalui program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD terkait maupun pemberian hibah kepada organisasi keagamaan.

5. Perluasan dan penciptaan lapangan pekerjaan kreatif, merata dan berkeadilan

Industri kreatif merupakan industri yang menghasilkan output dari pemanfaatan kreativitas, keahlian dan bakat individu untuk menciptakan nilai tambah, lapangan kerja dan peningkatan kualitas hidup. Ekonomi kreatif menjadi salah satu penyangga ekonomi nasional selain ekonomi pertanian, industri, dan informasi. Dari ekonomi kreatif, banyak tenaga kerja terserap, ekonomi kreatif juga memiliki nilai lebih karena meningkatkan citra dan identitas daerah.

Pemerintah Kota Kediri mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif di Kota Kediri sehingga dapat membuka lapangan kerja untuk menyerap tenaga kerja yang masih menganggur. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai prioritas ini adalah melalui pelaksanaan pelatihan-pelatihan, pemberian kredit lunak kepada UMKM, pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri, fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya, pengembangan potensi usaha produk unggulan, pengembangan pasar dan distribusi barang produk, peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

6. Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan berkeadilan

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat yang antara lain ditandai dengan meningkatnya status kesehatan ibu dan anak, membaiknya status gizi masyarakat, serta menurunnya penyakit menular dan tidak menular serta meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan berkeadilan pembangunan kesehatan tahun 2017 diarahkan pada pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat pada puskesmas baik secara manajemen, tenaga medis, maupun sarana dan prasarana puskesmas, peningkatan pelayanan

kesehatan masyarakat pada rumah sakit umum daerah (dengan meningkatkan layanan pada RSUD Gambiran maupun menambah layanan kesehatan yang berkualitas dengan mewujudkan RSUD Gambiran II sebagai rumah sakit tipe B), serta peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak. Selain itu, upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga dilakukan secara promotif-preventif melalui beberapa kegiatan, antara lain: pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, penyuluhan masyarakat tentang pola hidup sehat, pemberian makanan tambahan, penanggulangan KEP, anemia gizi besi, GAKY, kurang vitamin A, dan kekurangan zat mikro lainnya, pengawasan obat dan makanan, dan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.

7. Peningkatan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata, dan berkeadilan

Pembangunan pendidikan yang berkualitas tercermin pada proses pembelajaran yang efektif dengan menyediakan guru-guru bermutu yang memiliki kompetensi profesional, manajemen pendidikan yang baik serta sarana-prasarana yang memadai. Pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan Kota Kediri yang bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat, mengembangkan minat dan bakat, menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, toleran dan disiplin.

Upaya untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan di Kota Kediri dilaksanakan melalui program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Non Formal (PNF), serta program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Sejalan dengan itu, peningkatan mutu pelayanan pendidikan diupayakan melalui program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan serta manajemen pelayanan pendidikan.

8. Peningkatan pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur fisik prasarana, sosial dan ekonomi masyarakat

Pemerintah Kota Kediri berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat pada satuan wilayah terkecil yaitu Rukun Tetangga (RT). Masyarakat pada tingkat RT lebih mengetahui kebutuhan mendasar yang ada di lingkungannya. Untuk itu, Pemerintah Kota Kediri memfasilitasi dengan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) agar masyarakat dapat merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhannya. Namun demikian, agar program ini tepat sasaran maka kegiatannya diarahkan pada infrastruktur, ekonomi dan sosial.

Program ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Selain program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kelurahan dengan melibatkan masyarakat tingkat RT, Pemerintah Kota Kediri juga melaksanakan program pemberdayaan masyarakat bidang infrastruktur, sosial, dan budaya yang dilaksanakan SKPD terkait.

9. Peningkatan pemberdayaan perempuan, pemuda, olah raga, seni dan budaya

Keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari peran perempuan dan pemuda. Pemberdayaan perempuan dilakukan dengan merevitalisasi organisasi-organisasi perempuan dan perlindungan terhadap perempuan. Sedangkan pembangunan kepemudaan dan olah raga diarahkan peningkatan peran pemuda dalam pembangunan serta pembinaan dan pemasyarakatan olah raga.

Sementara itu, pembangunan bidang seni dan budaya diarahkan pada pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya, pengembangan nilai budaya serta pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Kota Kediri sehingga diharapkan dapat mengungkit perekonomian masyarakat.